

## ARTIKEL

## LITERASI POLITIK MASYARAKAT PESISIR DAN MANAJEMEN PARTAI POLITIK

### *Abstract*

*This article is the result of a research-based community service aimed to describe, identify and reveal how the management of political parties at the lower level that can ensure the actualization of its functions. Political parties are attached to the functions of political education that can create a political literacy society. That is people who are politically knowledgeable and politically empowered. Communities that can participate actively in any political activities of society, nationality and statehood. However, there are still many political blind people who are easily mobilized or even politically marginalized. This is for example found in coastal communities. That fact is possible because: first, geographically coastal tends to be a periphery; secondly, the optimal functioning of coastal political parties as a means of political education; And third, the lack of activities of coastal political parties that empower the community. Training and management of political party management becomes an action strategy and a choice of method of devotion. The corpus of community service is the management of political parties and coastal community leaders in Cikelet Sub-district, Garut. This community service applies management theories, political literacy and good governance. Based on the theories and methods, this community service indicates that trainees and assistance can improve capacity, capability and sensitivity for guaranteeing synergy of political party functions with the political literacy of coastal communities.*

**Keyword: Good Governance, Political Literacy, Management of Political Parties, Coastal Communities.**

---

**Asep A. Sahid Gatara  
& Kadar Nurjaman**

E-mail:  
[asepsahidgatara@uinsgd.ac.id](mailto:asepsahidgatara@uinsgd.ac.id)

---

Dosen FISIP  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

### **A. PENDAHULUAN**

Manajemen partai politik merupakan salah satu kunci pembuka bagi partai politik agar tetap bisa masuk sebagai pilar negara demokrasi. Hal itu karena manajemen partai politik senantiasa menekankan penggunaan seluruh sumber daya partai politik secara efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran. Bila manajemen partai politik itu berkualitas atau bermutu maka partai politik dapat berkiprah secara baik dan pada gilirannya

dapat berkontribusi bagi kualitas bangunan negara demokrasi di setiap tingkatannya. Sebaliknya, bila manajemen partai politik itu tidak bermutu maka kiprahnya menjadi buruk bagi setiap tingkatan bangunan negara demokrasi. Bahkan lebih dari itu, partai politik dengan manajemen yang buruk dapat memberikan dampak buruk bagi bangunan negara demokrasi.

Memang pada era sekarang ini tidak ada negara demokrasi tanpa kehadiran partai politik. Partai politik yang berkualitas menjadi penjamin bagi perawatan sekaligus peningkatan kualitas demokrasi suatu negara. Salah satu aspek penentu kualitas partai politik tersebut adalah terletak pada manajemen yang dianut dan dijalankannya. Aspek ini menentukan seberapa besar partai politik dapat tetap *survive* atau hidup sekaligus menghidupkan negara demokrasi.

Salah satu penanda bagi tetap *survive*-nya partai politik dalam perawatan serta peningkatan negara demokrasi adalah kehadirannya senantiasa diketahui dan dirasakan oleh masyarakat sekitar di mana partai politik itu berada. Oleh karena itu, partai politik dapat menjadi lembaga demokrasi harapan dan kepercayaan masyarakat. Di mana

setiap saat, tidak lagi lima tahun sekali, partai politik bagi masyarakat tidak hanya sebagai institusi kekuasaan, namun juga menjadi salah satu sumber informasi dan pengetahuan tentang perkembangan dunia politik. *Alhasil*, masyarakat akan mendapatkan kekayaan pengetahuan politik melalui partai politik. Di sinilah masyarakat potensial akan mengalami literasi politik, di mana mereka akan berdaya secara politik, dan pada gilirannya mereka tidak akan mudah diperdaya. Mereka menjadi subjek bukan menjadi objek dari segala kegiatan-kegiatan politik.

Sistem tata kelola partai politik berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama menurut AD/ART, baik secara vertikal maupun horizontal, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam partai politik. Tata kelola didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tata cara pemilihan pimpinan, etika pengurus, etika anggota, etika tenaga administrasi, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan. Sistem tata kelola (*input*, proses, *output* dan *outcome* serta

lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata kelola yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi melalui peraturan dan prosedur yang jelas.

Sistem dan pelaksanaan tata kelola di partai politik, sebagaimana tata kelola di perguruan tinggi, harus mampu menjamin terwujudnya visi partai politik, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, dan berhasilnya strategi yang digunakan secara sinergik, kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. Dengan semua jaminan itu, fungsi-fungsi yang melekat pada partai politik bisa benar-benar aktual bagi pemberdayaan masyarakat, terutama berdaya secara politik dengan meningkatnya literasi politik masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah partai politik sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik.

Namun sejauh ini, dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang masih buta politik. Hal itu ditunjukkan di mana mereka tidak antusias atau apatis terhadap kegiatan-kegiatan politik. Walaupun mereka terlibat dalam kegiatan politik, seperti pemberian suara pada setiap lima

tahun sekali, mereka banyak dimobilisasi ketimbang berpartisipasi aktif. Celaknya, kenyataan itu didorong oleh lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik, terutama partai politik. Salah satu contohnya adalah terjadi di masyarakat pesisir Kampung Cikelet, Desa Cikelet, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

Dalam laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Barat tahun 2015, partai politik sebagai salah satu variable dari aspek lembaga-lembaga demokrasi (*Democratic Institutions*) pada Indeks Demokrasi Indonesia, mengalami penurunan drastis, dari awalnya 71,37% di tahun 2014 menjadi 61,43 %, defisit sekitar -9,94%. Angka ini menunjukkan bahwa kinerja demokrasi partai politik berkategori tidak baik atau sedang. Salah satu indikator dari variable partai politik, yaitu, kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik pada tahun 2015 menunjukkan angka 57,14%.

Ini artinya, kinerja partai politik bagi demokrasi terkategori buruk. IDI mengklasifikasi tingkat demokrasi menjadi tiga kategori: yakni "baik" (indeks > 80), "sedang" (indeks 60 - 80), dan "buruk" (indeks < 60). Selain kegiatan kaderisasi, indikator

lainnya dari variable partai politik (hanya ada dua indikator) adalah perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi. Untuk indikator ini, kinerja demokrasi partai politik tahun 2015 menunjukkan angka 100% . (Lihat: Berita Resmi Statistik (BPS Provinsi Jawa Barat) No. 46/08/32/Th.XVIII, 05 Agustus 2016).

Untuk mendorong dilakukannya perubahan-perubahan terhadap kenyataan tersebut, khususnya peran partai politik tingkat anak cabang atau kecamatan, sebagai struktur kepengurusan partai politik yang paling bawah (dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 dan Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017), diperlukan adanya dorongan dari pihak-pihak terkait kepada *stakeholders* pemberdayaan demokrasi masyarakat bawah, seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Komisi Pemilihan Umum. Dalam hal seperti inilah pelatihan serta advokasi atau pendampingan perlu dilakukan melalui kemitraan berbagai pihak. Dengan harapan partai politik tingkat bawah tersebut, dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara sistemik dan dapat berkontribusi bagi

pemberdayaan literasi politik masyarakat pinggiran (dalam hal ini masyarakat pesisir). Sehingga mereka mengalami perubahan dengan memiliki kemandirian dan keberdayaan secara politik.

Dalam kegiatan ini, khalayak sasaran yang strategis adalah pengurus partai politik tingkat anak cabang, masyarakat pengguna dan aparatur penyelenggara pemerintahan kecamatan. Khalayak sasaran itu berada di lingkungan administratif Kecamatan Cikelet. Sebuah wilayah pesisir selatan Kabupaten Garut.

Secara geopolitik dan sosiopolitik, Kecamatan Cikelet termasuk daerah politik pesisir dengan kecenderungan perilaku politik tradisional, di samping perilaku politik transaksional. Di Kecamatan Cikelet ini hampir semua partai politik peserta Pemilu 2014 (Partai Nasdem, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Kesatuan Indonesia) memiliki kepengurusan Anak Cabang. Sejauh ini, partai politik yang dominan di Kecamatan Cikelet adalah Partai Golongan Karya.

Sejauh ini, meskipun hampir semua partai politik ada di

Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut, namun, sebagaimana disebutkan di atas, masyarakat Cikelet masih belum menunjukkan kepemilikan pengetahuan yang kuat tentang politik sekaligus keberdayaan secara politik. Dari sisi eksistensi partai politik setempat, hal itu disebabkan, pertama, belum optimalnya fungsi-fungsi partai politik di level anak cabang; kedua, minimnya kegiatan-kegiatan partai politik kepengurusan level anak cabang yang memberdayakan masyarakat; dan masih rendahnya melek politik masyarakat desa di kawasan pesisir.

Dari masalah yang dapat teridentifikasi, dapat dirumuskan masalah yang diselesaikan melalui pengabdian kepada masyarakat adalah bagaimana manajemen partai politik di tingkat bawah dapat meningkatkan literasi politik masyarakat bawah.

Bertitik tolak dari rumusan masalah itu, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan; pertama, meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan efektivitas pengelolaan partai politik di tingkat anak cabang yang dapat menjamin teraktualisasinya fungsi-fungsi partai politik; kedua, meningkatkan sinergi pengelolaan partai politik di tingkat anak cabang dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan literasi politik

masyarakat; dan ketiga, meningkatkan sensitifitas para peserta latihan tentang fungsi-fungsi partai politik dan isu-isu literasi politik masyarakat desa.

Adapun manfaat dari pengabdian ini adalah: pertama, memberikan perspektif baru bagi *stakeholders* dalam usaha-usaha merencanakan dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan fungsi-fungsi partai politik di tingkat kecamatan; kedua, membekali para *stakeholders* pengelolaan partai politik di tingkat kecamatan (pimpinan partai politik, masyarakat pengguna dan apparatus pemerintahan kecamatan) tentang pengetahuan dan keterampilan dalam membangun sinergi pengelolaan partai politik dengan pemberdayaan literasi politik masyarakat; dan ketiga, menambah metode alternatif dalam pemberdayaan literasi politik masyarakat pesisir.

## **B. KERANGKA TEORI**

Pengabdian kepada masyarakat dengan korpus masyarakat pesisir telah banyak dilakukan oleh sejumlah pihak, namun sejauh ini pengabdian dengan kekhusuan pemanfaatan dan penerapan teori manajemen partai politik, *good governance* dan literasi politik bagi pemberdayaan masyarakat pesisir, melalui penelusuran pustaka, belum ada yang melaksanakannya. Oleh karena itu, program ini menjadi unik dan menarik.

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan landasan teori

sebagai alat bedah dan kerangka pemikiran sebagai berikut:

1. Fungsi partai politik selain sebagai sarana rekrutmen politik dan mempertahankan serta merebut kekuasaan, juga sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik dan sarana pengatur konflik (Miriam Budiardjo, 1998: 163). Dalam dan melalui fungsi-fungsi itu, partai politik itu dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat;
2. Untuk terjaminnya fungsi-fungsi partai politik tersebut terus aktual di masyarakat maka dibutuhkan manajemen partai politik yang sensitif fungsi;
3. Manajemen partai politik yang sensitif fungsi adalah manajemen partai politik berbasis *good governance*. Sebuah gaya manajemen atau paradigma manajemen yang mendayagunakan semua sumber daya partai politik guna mencapai tujuan bersama dengan mengedepankan tata kelola kelembagaan yang baik. Yaitu, tata kelola yang bertumpu pada prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, tegaknya supermasi hukum, transparansi, peduli terhadap *stakeholders*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis. (MTI, 2002: vii)
4. Melalui manajemen berbasis *good governance*, program-

program partai politik dapat berintegrasi dengan pemberdayaan literasi politik masyarakat. Di sini partai politik dapat melakukan pendidikan politik dengan menghasilkan masyarakat *melek* politik. Yaitu, masyarakat berpengetahuan politik, baik politik prosedural maupun politik substantial. *Melek* politik tersebut memiliki daya pengaruh yang besar terhadap sikap dan perilaku politik masyarakat.

Literasi politik secara umum merupakan upaya untuk menjadikan setiap warga Negara untuk berpartisipasi politik secara kritis dengan membekali diri kemampuan dan kapabilitas politik. Maka, ketika warga negara berpartisipasi politik, baik partisipasi politik formal seperti pemilu dan pilkada maupun partisipasi politik dalam bentuk lainnya, semestinya hal itu dilakukan dengan kapabilitas politik yang memadai (Iding Rosyidin, 2017).

Literasi politik dijelaskan oleh Bernard Crick (dalam Andi Faisal Bhakti dkk, 2012: 117 dan dalam Iding Rosyidin, 2017: 7-8) bahwa literasi politik adalah pemahaman praktis tentang konsep-konsep yang diambil dari kehidupan sehari-hari dan bahasa.

Literasi politik umumnya berkaitan dengan tiga kemampuan atau keterampilan: Yaitu keterampilan kognitif (*cognitive*

*skill*), afektif (*affective skill*), dan konatif atau psikomotorik. Kognitif terkait dengan pengetahuan warga mengenai hal ihwal politik dan segala hal yang terkait.

Dalam perspektif literasi politik, setiap warga negara sejatinya memiliki pengetahuan politik yang memadai ketika terlibat dalam kehidupan politik praktis. Karena tanpa pengetahuan politik yang memadai ia berpotensi untuk mudah dimanipulasi atau dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik. Pada sisi yang lain, pengetahuan politik juga sangat membantu warga ketika berpartisipasi politik, paling tidak dapat menjadi panduannya sehingga tidak seperti orang buta. Misalnya pada saat seorang warga akan berpartisipasi dalam pemilu atau pilkada. Tentu akan sangat bermanfaat kalau warga memahami benar tentang aturan dan sistem pemilu.

Demikian juga tentang para kontestan pemilu, baik di daerah maupun pusat (legislatif maupun eksekutif). Warga seyogianya mengetahui benar tentang siapa mereka, bagaimana prestasinya, bagaimana rekam jejak (*track record*)nya, dan lain sebagainya. Dengan pengetahuan politik itulah, warga dapat menggunakan hak politiknya secara substantif dan kualitatif.

Sedangkan keterampilan afektif lebih menonjolkan aspek emosi atau perasaan, seperti simpati, empati politik dan sebagainya. Termasuk ke dalam keterampilan afektif adalah dukungan,

pembelaan, dan sebagainya. Dalam hal ini, warga yang telah terliterasikan secara politik dapat memberikan empati atau pembelaan politik pada seorang calon atau politisi. Namun, tentu saja, aspek afektif ini tidak dapat dipisahkan dari aspek pengetahuan politik. Dengan kata lain, empati atau pembelaan politik diberikan pada kandidat atau politisi secara begitu saja atau karena hubungan dekat, melainkan didasarkan pada pengetahuan politiknya tentang kandidat atau politisi tersebut.

Adapun keterampilan konatif atau psikomotorik berhubungan dengan bagaimana warga mahir melakukan praktik - praktik politik yang demokratis. Nilai-nilai demokrasi yang ditemukan dalam teori-teori, diwujudkan dalam kehidupan nyata, mulai dari ruang lingkup kecil seperti keluarga sampai pada ruang lingkup yang lebih besar seperti negara. Dalam kehidupan keluarga, misalnya, seorang kepala keluarga bisa menjadi pemimpin yang demokratis: memberikan kesempatan kepada setiap anggota keluarga untuk menyampaikan keinginan, bahkan keluh-kesah, dan sebagainya; tidak memaksakan kehendaknya kepada anggota keluarga atau menekan mereka supaya mengikuti kemauannya tanpa memberinya kesempatan untuk memilih.

Dalam perspektif literasi politik, keterampilan konatif pada ruang lingkup yang lebih besar seperti negara tercermin dari kemampuan elite-elite politiknya dalam

mengelola kepentingan publik, baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun di lembaga-lembaga politik seperti partai politik. Ketika para elite politik tersebut terampil menerapkan nilai-nilai demokrasi, misalnya, elite partai politik memberikan peluang yang sama kepada setiap kadernya untuk tampil, maka mereka pun dapat dipandang telah terliterasikan secara politik (Iding Rosyidin, 2017: 8).

Berpijak pada landasan teori dan kerangka pemikiran tersebut maka langkah-langkah pemecahan masalah dapat ditempuh sebagai berikut:

1. Membangun kemitraan dengan para pemangku kepentingan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dengan mendorong peran serta partai politik bagi literasi politik masyarakat;
2. Melaksanakan pelatihan manajemen partai politik berbasis *good governance* dalam kerangka pemberdayaan literasi politik masyarakat;
3. Melaksanakan pendampingan bagi para pimpinan partai politik tingkat bawah dalam upaya meningkatkan aktualisasi fungsi-fungsi partai politik.

### C. METODE

Dalam rangka mencapai tujuan kegiatan di atas maka ditempuh cara-cara atau langkah-langkah dengan bertitik tolak pada siklus

Transect, Rembug Warga, Perencanaan Partisipatif, Sinergi Program dan Pelaksanaan Program, Monitoring dan Evaluasi. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghubungi Camat Cikelet dan sejumlah tokoh masyarakat untuk menelusuri permasalahan literasi politik masyarakat Kecamatan Cikelet dan peran partai politik di dalamnya. Setelah itu dirumuskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam bidang pemberdayaan politik. langkah-langkah ini bagian yang tidak terpisah dari siklus Transect, Rembug Warga dan Perencanaan Partisipatif;
2. Bersama *stakeholders* pemberdayaan masyarakat dan desa merumuskan program yang dapat menawarkan solusi pemecahan masalah. Di sini program dimaksud adalah pelatihan pemberdayaan literasi politik masyarakat melalui penguatan fungsi-fungsi partai politik. Langkah ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari siklus sinergi program dan pelaksanaan program.
3. Untuk menjaga agar tujuan, manfaat dan sasaran kegiatan ini terlaksana sebagaimana tercantum, maka selama dan setelah kegiatan dilaksanakan langkah-langkah monitoring dan evaluasi.



4. Tahap pelaksanaan kegiatan pelatihan seluruh peserta didorong lebih aktif dan kritis dengan harapan adanya peningkatan kemampuan pemahaman, kesadaran dan kepekaan para peserta tentang pentingnya peningkatan mutu manajemen partai politik bagi pemberdayaan literasi politik masyarakat, yang sifatnya tidak saja perubahan kognitif tetapi juga perubahan efektif. Oleh karena itu, materi-materi latihan manajemen partai politik sensitif dengan kerangka pemberdayaan literasi politik masyarakat, yaitu:

- a. Konsep manajemen partai politik; Konsep literasi politik; Konsep pemberdayaan masyarakat; dan Konsep *good governance*;
- b. Relasi fungsi partai politik dengan literasi politik masyarakat;
- c. Isu-isu, Kebijakan dan Strategi pemberdayaan literasi politik masyarakat;
- d. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan literasi politik masyarakat; dan
- e. Rencana Aksi:
  1. Mendorong pengarusutamaan *Good Political Party Governance* (GPPG)
  2. Mendorong kegiatan literasi politik masyarakat sebagai indikator variable partai politik pada Indeks Demokrasi Indonesia.

Metode kegiatan pengabdian di atas merupakan bagian dari variasi implementasi metode *Participatory Action Research* (PAR). Demikian itu karena, *pertama*, program pengabdian ini hendak menjadi bagian dari sebuah proses sosial. Secara sadar program ini mengkaji dan mengintegrasikan hubungan antara ranah individu dengan ranah sosial. Tidak ada individuasi tanpa sosialisasi, dan sosialisasipun tidak mungkin tanpa individuasi. *Kedua*, partisipatoris. Artinya, program ini akan mengajak masyarakat untuk mengkaji sekaligus mengkonsumsi ilmu pengetahuan (pemahaman, kecakapan dan nilai-nilai) dan kategori interpretatif mereka (yaitu, cara mereka menafsirkan diri sendiri dan tindakannya dalam dunia sosial dan material).

*Ketiga*, praktis dan kolaboratif. Program ini akan mengajak masyarakat mengkaji dan mengkonsumsi praktik-praktik sosial yang menghubungkan diri mereka dengan orang-orang lain dalam interaksi sosial. Program ini berupaya untuk menjalin kerja sama dalam merekonstruksi interaksi-interaksi sosial mereka dengan merekonstruksi tindakan-tindakan yang membentuk interaksi mereka. *Keempat*, emansipatoris. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar pulih dan melepaskan diri mereka dari tekanan-tekanan struktur sosial yang irasional, tidak produktif, tidak adil, dan tidak memuaskan yang membatasi perkembangan-diri dan kemandirian-diri. Selain

itu, program ini dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengeksplorasi cara-cara praktik mereka dibentuk dan ditentukan oleh struktur-struktur sosial yang lebih luas dan mengkaji apakah diri mereka dapat terlibat untuk melepaskan diri dari hambatan-hambatan tersebut.

*Kelima*, kritis. Yaitu, bertujuan untuk membantu masyarakat agar pulih dan melepaskan diri sendiri dari hambatan-hambatan yang lekat dengan media sosial yang menjadi wahana interaksi mereka: bahasa (wacana) mereka, pola kerja, dan relasi sosial kekuasaan (yang menjadi sarana bagi mereka untuk mengalami afiliasi dan perbedaan, inklusi dan eksklusivitas, yaitu, relasi-relasi yang, berbicara secara gramatis, menjadi sarana bagi mereka untuk berinteraksi dengan orang-orang lain dalam pola orang ketiga, kedua atau pertama). *Keenam*, rekursif atau reflektif, dialektis, Yaitu, bertujuan untuk membantu manusia dalam mengkaji realitas agar mampu mengubahnya dan mengubah realitas agar dapat mengkajinya (khususnya dengan mengubah praktik-praktik mereka melalui spiral siklus aksi dan pengkajian kritis dan kritis diri sebagai sebuah proses perubahan sosial sadar yang dirancang untuk membantu masyarakat agar dapat banyak belajar tentang (dan menyusun teori tentang) praktik-praktik, ilmu pengetahuan tentang praktik, dan aneka struktur sosial yang membentuk dan membatasi

praktik-praktik mereka, serta media sosial yang menjadi wahana untuk menyuarakan praktik-praktik mereka. Dan *ketujuh*, bertujuan untuk mengubah teori dan praktik. Program ini tidak mementingkan salah satunya, melainkan mengartikulasikan dan mengembangkan keduanya dalam hubungannya satu sama lain melalui penalaran kritis tentang teori dan praktik berikut konsekuensi-konsekuensi keduanya. (Stephen Kemmis dan Robin McTaggart dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 2009: 472-473).

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Identitas Partisipan dan Lokasi Pengabdian**

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Workshop Manajemen Partai Politik tingkat bawah bagi literasi politik masyarakat pesisir diikuti oleh partisipan yang berjumlah 25 orang. Partisipan terdiri dari 4 (empat) orang perempuan dan 21 (dua puluh satu) laki-laki. Partisipan merupakan utusan dari partai politik tingkat kecamatan (sesuai dengan undang-undang partai politik) se-Kecamatan Cikelet, utusan dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemerintah. Utusan dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah sebagai perwakilan komunitas pengguna partai politik tingkat bawah. Kegiatan dilaksanakan selama dua

hari, Sabtu-Minggu, 19-20 Agustus 2017.

Lokasi pengabdian adalah wilayah administratif Kecamatan Cikelet. Kecamatan ini terletak di bagian selatan Kabupaten Garut. Batas-batas wilayah Kecamatan Cikelet, yaitu:

Sebelah Utara : Kecamatan Ci sompet  
 Sebelah Timur : Kecamatan Pa meungpeuk  
 Sebelah Selatan : Samudra Hindia  
 Sebelah Barat : Kecamatan Pa kenjeng

Luas wilayah Kecamatan Cikelet yaitu 17.232 ha dengan memiliki 11 desa, yaitu: Desa Cikelet, Desa Cijambe, Desa Cigadog, Desa Pamalayan, Desa Kertamukti, Desa Linggamanik, Desa Karangsari, Desa Girimukti, Desa Ciroyom, Desa Tipar, dan Desa Awasagara). Dalam sejarah pendirian Kecamatan Cikelet tahun 1968, desa Cikelet merupakan salah satu dari tiga desa pokok atau desa pendiri, sebelum adanya pemekaran-pemekaran ([www.cikelet.garutkab.go.id/](http://www.cikelet.garutkab.go.id/diakses_pada_tanggal_20_Juli_2017) diakses pada tanggal 20 Juli 2017).

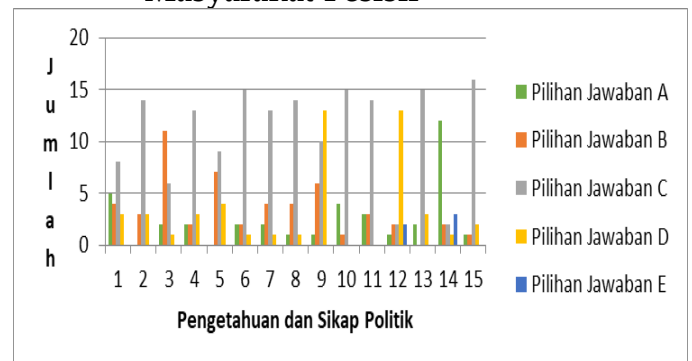
## 2. Profil Objek dan Proses Pengabdian

Pada hari pertama, kegiatan pengabdian diisi dengan acara pembukaan dan pelaksanaan workshop. Acara pembukaan dihadiri oleh Camat Kecamatan Cikelet dan sejumlah perwakilan unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) lainnya. Setelah pembukaan selesai, acara

dilanjutkan dengan pengisian soal-soal *pre-test* oleh peserta workshop yang telah disediakan oleh fasilitator. Soal-soal *pre-test* ini terdiri dari tiga aspek, yakni, aspek pengetahuan atau wawasan manajemen partai politik dan literasi politik, aspek orientasi atau sikap, dan aspek keahlian atau keterampilan. Pengisian *pre-test* dilaksanakan selama dua puluh menit.

Dalam *pre-test* tersebut diketahui bahwa pengetahuan peserta tentang apa itu politik dan lain sebagainya sangat beragam. Hal itu dapat disimak pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1.**  
**Pengetahuan dan Sikap Politik Masyarakat Pesisir**



Sumber: Diolah dari hasil *pre test* peserta workshop manajemen partai politik dan literasi politik di Cikelet, Kabupaten Garut, 2017

Namun demikian, melihat gambar di atas mayoritas berpandangan bahwa politik adalah segala tindakan pengelolaan kepentingan publik. Berikutnya adalah pengetahuan bahwa politik itu perihal mempertahankan dan memperebutkan kekuasaan semata; Lalu, politik itu senantiasa menggambarkan masyarakat yang penuh konflik (kegaduhan belaka); Dan selebihnya, mereka tidak memiliki pengetahuan tentang apa itu politik.

Sementara itu sikap mereka terhadap politik mayoritas menunjukkan orientasi bahwa bagi mereka politik itu adalah cara bertindak dalam menghadapi atau menangani masalah; kemudian disusul oleh peserta yang memiliki orientasi bahwa politik merupakan cara memperdaya lawan; dan selebihnya tidak memiliki sikap terhadap kehidupan politik.

Adapun mengenai partai politik, mayoritas dari mereka memiliki pandangan bahwa partai politik itu kumpulan masyarakat yang beridentitas untuk mencapai tujuan bersama melalui dan dalam kekuasaan. Selebihnya berpandangan bahwa partai politik itu adalah organisasi politik yang penuh dengan intrik dan konflik kepentingan para pengurus, anggota/kader dan simpatisan. Di samping itu, partai politik dipandang sebagai lembaga perkumpulan sejumlah partai politik. Sedangkan fungsi dari partai politik itu dipandang

sebagai sarana untuk rekrutmen politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, pengaturan konflik, dan pendidikan politik. Selanjutnya, terdapat juga yang memiliki pengetahuan bahwa fungsi partai politik adalah sarana untuk mempertahankan kekuasaan sekuat-kuatnya.

Adapun pandangan sikap terhadap peran partai politik dan warga dalam kehidupan sosial cenderung lebih banyak terkonsentrasi pada sikap bahwa memiliki hubungan setara, saling melengkapi dan saling melegitimasi. Tidak kalah banyak juga, peserta yang memiliki sikap bahwa hubungan partai politik dan awarga hanya sebatas sementara, yang dibentuk oleh peristiwa politik yang tengah dan akan berlangsung, seperti Pemilu dan Pilkada. Selebihnya tidak memiliki keyakinan atau sikap terhadap hubungan keduanya.

Sementara itu, pengetahuan mengenai manajemen partai politik banyak terpusat pada pandangan sebagai manajemen partai politik sebagai penggunaan sumber daya partai politik secara efektif untuk mencapai tujuan. Disusul kemudian oleh pandangan bahwa manajemen partai politik merupakan segala tindakan untuk menjadikan partai politik menang dalam setiap pemilihan. Hanya sedikit yang memiliki pandangan bahwa manajemen partai politik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang politik. Hal yang sama pada pandangan yang

kurang yakin mengenai segala pandangan yang dimilikinya.

Pengetahuan mayoritas peserta tentang *good governance* tidak memiliki keyakinan yang kuat. Selebihnya *good governance* dipandang sebagai kepemimpinan politik yang baik, kemudian tata kelola pemerintahan yang baik, dan pemerintahan gubernur yang baik. Adapun prinsip-prinsip *good governance* banyak berpatokan pada nilai partaisipasi, supermasi hukum, transparansi, akuntabilitas, peduli pada *stakeholders*, konsensus, akuntabilitas, kesetaraan, efektif dan efisien, dan visi strategis. Setelah itu prinsip-prinsip *good governance* itu adalah saling menguntungkan, saling memperhatikan, saling membahagiakan, dan saling mengamankan. Selebihnya melihat prinsip-prinsip *good governance* adalah kemashuran, keterkenalan, keterpilihan, keterpercayaan, dan keterwakilan.

Adapun pengetahuan tentang apa itu literasi politik lebih banyak berpusat pada pandangan mengenai kepemilikan wawasan atau pengetahuan politik yang mendalam. Selebihnya literasi politik dilihat sebagai kepemilikan kedudukan atau jabatan yang paling tinggi. Di samping itu, literasi politik adalah setiap kegiatan yang membuat tenang kehidupan politik. Sementara sikap mengenai tanggung jawab bagi pelaksanaan literasi politik lebih diarahkan pada pentingnya sinergi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat.

Kemudian pandangan peserta mengenai definisi dan posisi masyarakat pesisir banyak didominasi oleh pandangan bahwa masyarakat pesisir itu marginal secara geografis, kemudian dilanjutkan oleh pandangan bahwa masyarakat pesisir itu marginal secara politis.

Selanjutnya menjawab pertanyaan mengenai pemberdayaan masyarakat sebagai tanggung jawab siapa. Pandangan peserta banyak terpusat pada pentingnya peran pemerintah, dan selanjutnya peran masyarakat dan peran partai politik.

Terakhir, sikap masyarakat pesisir dan pengurus partai politik tingkat bawah terhadap pentingnya pengarusutamaan partai politik sensitif literasi politik banyak yang ideal, yakni pentingnya memasukan fungsi literasi politik pada setiap program dan kegiatan partai politik. Setelah itu pandangan bahwa hlaitu merupakan pemaksaan partai politik untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara politik. Di samping itu, memaksa masyarakat untuk selalu dekat dan akrab dengan partai politik.

Setelah *pre-test* selesai, acara dilanjutkan dengan penyampaian gambaran umum workshop yang disampaikan oleh ketua kelompok pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, acara diisi dengan kegiatan dinamika kelompok dan materi Analisis Sosial (Ansos) yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung

Djati Bandung. Materi Ansos ditekankan pada pemetaan sosial, perencanaan partisipatif dan pelaksanaan kolaborasi program pengabdian kepada masyarakat.

Acara selanjutnya adalah disampaikan dan didialogkan secara berturut-turut materi workshop tentang konsep partai politik dan literasi politik, konsep manajemen dan *good governance*, dan partai politik dan parlemen: menuju sinergi untuk literasi politik masyarakat pesisir. Materi pertama berkaitan dengan model aktualisasi partai politik sensitif literasi. Materi ini mencakup tentang konsep politik, konsep partai politik dan konsep literasi politik. Nara sumber dari materi ini adalah akademisi ilmu politik.

Materi kedua berkaitan dengan model penggunaan fungsi-fungsi partai politik. Materi kedua ini disampaikan oleh akademisi. Sementara itu, materi ketiga berkaitan dengan konsep relasi partai politik dengan parlemen. Materi ketiga ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Garut. Pada setiap penyampaian materi, mulai dari materi pertama sampai materi ketiga, dilakukan dengan model dialog yang menekankan penggalian akar permasalahan, kebutuhan dan solusi penyelesaian sesuai dengan materi yang disampaikan.

Hari kedua, kegiatan workshop diisi dengan penyampaian materi, diskusi kelompok dan simulasi formulasi aksi. Materi yang disampaikan adalah

mengenai isu-isu politik lokal dan pembinaan kesatuan bangsa. Sub materinya berkaitan dengan teori integrasi politik, konsep kesatuan bangsa dan pengelolaan isu-isu politik, dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Garut. Materi ini disampaikan oleh Kasubid Wasbang dan Pembauran Kebangsaan Badan Kesbangpol Kabupaten Garut.

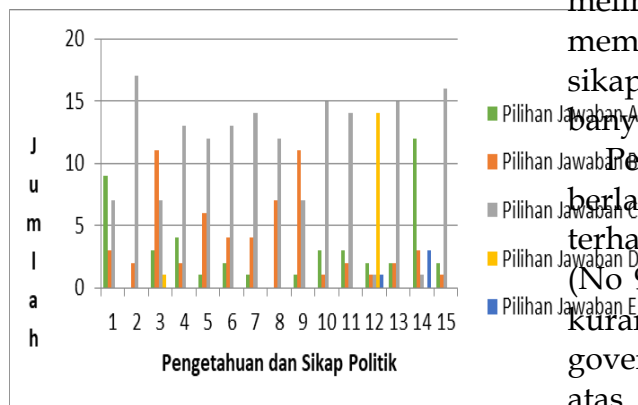
Acara dilanjutkan dengan presentasi dan diskusi kelompok, setelah sebelumnya peserta dibagi lima kelompok. Masing-masing kelompok mendalami satu materi workshop yang disampaikan dan didialogkan sebelumnya. Setiap diskusi diarahkan pada penggalian akar masalah, inventarisasi daftar kebutuhan dan penyusunan rencana strategis dalam penguatan literasi masyarakat pesisir.

Setelah diskusi kelompok selesai, acara dilanjutkan pada kegiatan formulasi kesepakatan bersama tentang Pengarusutamaan Partai Politik Sensitif Literasi Politik Masyarakat (P3 SLPM). Pada kegiatan ini diisi dengan curah pendapat tentang kebijakan program dan kegiatan lanjutan; pembentukan dan penguatan kelembagaan; pembentukan dan penguatan jejaring; dan model serta metode promosi P3-SLPM.

Kemudian, sebelum acara ditutup secara resmi, semua peserta workshop mengisi terlebih dahulu *post test*. Soal-soal *post test* ini sama dengan soal *pre-test* yang terdiri dari aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Setelah

selesai *post test*, acara dilanjutkan dengan penutupan. Acara penutupan tersebut dihadiri oleh perwakilan Badan Kesbangpol Kabupaten Garut dan Muspika Kecamatan Cikelet. Adapun hasil *post test* dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2.**  
**Pergeseran Pengetahuan dan Sikap Politik Masyarakat Pesisir**



Sumber: Diolah dari hasil *post test* peserta workshop manajemen partai politik dan literasi politik di Cikelet, Kabupaten Garut, 2017.

Dari hasil penggalan dan pemetaan data melalui *post test* di atas diketahui bahwa pengetahuan dan sikap politik masyarakat pesisir umumnya mengalami pergeseran. Hal itu misalnya tergambar pada pemahaman apa itu politik (No.1). Sebelumnya mayoritas masyarakat pesisir memahami politik itu segala tindakan penanganan atau pengelolaan kepentingan-kepentingan publik, bergeser

menjadi bahwa politik itu seni merebut dan mempertahankan kekuasaan. Hanya sedikit yang memiliki pandangan bahwa politik itu adalah istilah sosial yang digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang penuh konflik.

Pergeseran tajam juga berlangsung pada sikap terhadap kehidupan politik (no.2), di mana mayoritas masyarakat pesisir memiliki sikap bahwa politik sebagai cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Hanya segelintir masyarakat pesisir yang masih melihat politik sebagai cara memberdaya lawan. Sebelumnya, sikap seperti itu disampaikan oleh banyak orang dalam *pre-test*.

Pergeseran yang mencolok juga berlangsung pada pemahaman terhadap konsep *good governance* (No 9). Jika sebelumnya mayoritas kurang yakin dengan apa itu *good governance*, maka pada gambar di atas meunjukkan ada pergeseran di mana mayoritas memahami bahwa *good governance* adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Selebihnya masih ada yang berpandangan *good governance* adalah kepemimpinan politik yang baik dan atau pemerintahan gubernur yang baik.

Dan pergeseran berikutnya ditunjukkan pada konsepsi diri mereka mengenai masyarakat pesisir itu sendiri (No. 13). Jika sebelumnya ada sejumlah masyarakat pesisir yang kurang yakin terhadap pandangan keterpinggirannya, maka dari gambar 2 di atas terlihat adanya keyakinan penuh bahwa

masyarakat pesisir adalah masyarakat marginal. Khususnya marginal secara geografis, kemudian marginal secara biologis dan secara politis.

### 3. Analisis Deskriptif

*"Gaduh di atas, Teduh di bawah"*

Potongan kalimat di atas merupakan salah satu ujaran menggelitik yang dikemukakan oleh sejumlah partisipan Workshop Manajemen Partai Politik bagi Literasi Masyarakat Pesisir.

Ujaran tersebut menyimpan banyak pesan sosial-politik. Di antara pesan itu bahwa partai politik tingkatan bawah ((kecamatan atau desa) memiliki ekspektasi untuk tetap komitmen dalam merawat keteduhan politik di lapisan masyarakat bawah. Atau dalam arti lain, biarkan saja partai politik di tingkat atas membuat kegaduhan, namun partai politik di tingkat bawah tetap menciptakan keteduhan bagi masyarakat sekitarnya.

Seerti diketahui, belakangan ini misalnya, paling tidak ketika artikel ini ditulis, mendekati masa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018, termasuk di Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut, seluruh partai politik terus bergerilya politik guna mendapatkan bakal calon kepala daerah yang mumpuni. Di samping itu, mereka juga terus bergerilya guna merebut lirikan politik sejumlah partai lainnya untuk berkoalisi. Tentu

akrobat dan gerilya itu memunculkan percikan ragam kegaduhan politik.

Sebenarnya perilaku partai politik seperti di atas dinilai wajar dalam masa-masa kontestasi politik. Karena kontestasi merupakan salah satu unsur penting bagi tegaknya iklim demokrasi dan ia senantiasa menstimulasi partai politik agar terus berupaya menggerakkan fungsi-fungsinya, terutama fungsi rekrutmen politik dan fungsi komunikasi politik.

Namun demikian, upaya itu tentu belum dapat dikatakan cukup bilamana gerilya politik itu tidak dialamatkan kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan suara. Partai politik sejatinya juga melakukan demonstrasi atau komunikasi politik ke masyarakat bawah agar mereka senantiasa tahu dan mau berpartisipasi dalam setiap tahapan perekrutan bakal calon kepala daerah.

Memang di era sekarang ini tidak ada negara demokrasi tanpa kehadiran partai politik. Oleh karena itu, derajat mutu negara demokrasi itu sendiri sangat ditentukan oleh hadirnya mutu partai politik. Yaitu, partai politik yang memiliki kemampuan untuk memerankan fungsi-fungsinya secara optimal, seperti fungsi sebagai sarana pendidikan politik, sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana pengaturan dan peneduhan konflik.



### **Manajemen yang Baik**

Salah satu aspek peningkatan mutu partai politik tersebut terletak pada manajemen yang dianut dan dijalankan partai politik. Aspek tersebut menentukan seberapa besar partai politik dapat tetap hidup sekaligus menghidupkan negara demokrasi. Penanda bagi tetap hidupnya partai politik dalam perawatan serta peningkatan mutu negara demokrasi adalah kehadirannya senantiasa diketahui dan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Di mana setiap waktu, tidak lagi lima tahun sekali, partai politik bagi masyarakat menjadi salah satu institusi sumber informasi dan pengetahuan tentang dunia politik praktis.

Manajemen politik dapat berjalan secara baik melalui mekanisme yang disepakati bersama menurut aturan dasarnya (AD/ART), serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam partai politik. Manajemen yang baik adalah manajemen yang berbasis *good governance*. Suatu tata kelola partai politik yang dicerminkan dengan tegaknya prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, efektif, efisien, akuntabel, berorientasi *stakeholders*, dan visi strategis.

Sistem dan pelaksanaan manajemen partai politik tersebut akan mampu menjamin terwujudnya visi-misi partai politik dan berhasilnya strategi yang digunakan secara sinergik. Dengan semua jaminan itu, fungsi-

fungsi yang melekat pada partai politik dapat teraktualisasikan bagi pemberdayaan masyarakat, terutama meningkatnya derajat literasi atau melek politik masyarakat.

Namun ironisnya, bila melihat profil objek di atas, sejauh ini justru masih banyak masyarakat yang buta politik. Oleh sebab itu, mereka menjadi apatis terhadap kegiatan-kegiatan politik. Kenyataan itu di antaranya didorong oleh tingkat pengetahuan atau pemahaman tentang politik para pengurus partai politik di struktur paling bawah masih diwarnai oleh kekurangyakinan tentang pemahaman apa itu politik.

Selain itu, banyak juga diwarnai oleh pengetahuan bahwa politik itu sekedar aktivitas merebut dan mempertahankan kekuasaan. Di samping itu, politik banyak juga dipandang sebagai aktivitas konflik belaka. Padahal politik bukan sekedar itu. Ia adalah segala tindakan pengelolaan kepentingan-kepentingan publik.

Tentu pandangan para pengurus partai politik struktur bawah dan masyarakat pesisir itu sangat terkait dengan sosialisasi politik yang diperolehnya dan pendidikan politik yang ditempuhnya. Hasil dari sosialisasi dan pendidikan politik tersebut sejatinya terletak pada bagaimana pengelolaan partai politik. Terutama pengelolaan dalam penggalian segala sumber daya partai politik. Dari mulai perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, pengendalian, sampai pada pengevaluasian.

Di sinilah pentingnya manajemen partai politik berbasis tata kelola yang baik (*good governance*). Sebuah tata kelola partai politik yang memperhatikan prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, efektifitas, efesiensi, kesetaraan, visi strategis, dan kepastian hukum atau tegaknya peraturan.

Dengan semua itu, potensi-potensi konstruktif partai politik, khususnya potensi pemberdayaan masyarakat bagi literasi politik, bisa terdayagunakan atau teraktualisasikan dengan optimal. Dan pada gilirannya potensi-potensi itu dapat bertransformasi menjadi fungsi. Yaitu, fungsi partai politik sebagai sarana literasi politik masyarakat sekitar.

Tentu semua itu juga dapat menjadi salah satu jawaban terhadap semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik karena masih belum optimalnya fungsi dan peran partai politik dalam pemberdayaan kehidupan demokrasi masyarakat.

### **Kemitraan Strategis dan Aktual**

Dinamis atau tinggi-rendahnya pengetahuan dan sikap politik masyarakat pesisir, sebagaimana tergambarkan pada profil objek pengabdian di atas, tidak terlepas dari tingkat kerja sama antara kelembagaan demokrasi lokal yang dilakukan selama ini dalam

melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik. Masih banyak pandangan masyarakat pesisir yang kurang yakin dengan politik misalnya, tidak terlepas dari masih rendahnya kerja sama atau sinergi sejumlah kelembagaan demokrasi lokal yang ada, seperti partai politik struktur bawah, pranata masyarakat, dan pemerintah.

Demikian itu dapat dilihat karena belum adanya komunikasi dan koordinasi yang setara, baik secara regular maupun non-regular (baca: formal dan non-formal) di antara mereka. Padahal kedua aspek interaksi sosial tersebut sangat signifikan bagi penentuan derajat kerja sama antara subjek dalam menghadapi masalah-masalah bersama.

Partai politik sebagai pilar utama demokrasi seyogyanya menjadi inisiator dari setiap upaya pencairan atas kebekuan komunikasi dan koordinasi, terutama dalam konteks penyelesaian masalah-masalah yang berhubungan dengan bangunan dan lingkungan demokrasi. Termasuk masalah masih adanya keterbelakangan dan ketertinggalan pengetahuan dan sikap politik masyarakat pesisir.

Oleh karena itu, upaya mendorong adanya perubahan atau perbaikan pengetahuan dan sikap politik masyarakat pesisir, yang diwakili para pengurus partai politik tingkat bawah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah, diperlukan. Upaya

tersebut dapat berupa penguatan kembali edukasi dan advokasi pengelolaan partai politik dari pihak-pihak terkait, seperti partai politik dengan lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga pemerintahan maupun lembaga-lembaga non pemerintah.

Dorongan edukasi dan advokasi itu sejatinya disampaikan kepada para pemangku kepentingan penyelenggara demokrasi, seperti partai politik, pemerintah, komisi pemilihan umum, dan masyarakat sipil melalui kemitraan-kemitraan yang saling memberikan manfaat. Dengan harapan dorongan kemitraan tersebut dapat benar-benar mengangkat peran lembaga-lembaga politik, khususnya partai politik, dalam melaksanakan seluruh fungsi-fungsinya secara utuh dan teduh.

#### E. KESIMPULAN

Penggambaran terhadap pelaksanaan dan hasil pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dalam aksi manajemen partai politik tingkat bawah bagi literasi politik masyarakat pesisir Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut menunjukkan adanya kecenderungan penyempitan pemahaman mengenai politik dan fungsi partai politik. Bahwa masih tersimpan pengetahuan dan sikap politik yang minor. Hal itu misalnya masih ada pandangan bahwa politik adalah rebutan kekuasaan dan kegaduhan belaka. Sementara itu, partai politik merupakan kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan yang sebesar-besarnya.

Makna-makna politik lainnya yang mencuat, seperti makna penyelenggaraan kepentingan publik potensial terpinggirkan. Demikian juga makna mengenai fungsi-fungsi partai politik lainnya, seperti fungsi kaderisasi dan pendidikan politik menunjukkan cenderung ke pinggir ketimbang ke tengah. Hal itu disebabkan oleh lemahnya manajemen partai politik berbasis *good governance*, terutama dalam penerapan dan pemanfaatan prinsip partisipasi masyarakat, prinsip peduli pada *stakeholders* dan prinsip visi strategis.

Oleh karena itu, terbuka sangat lebar jarak antara partai politik dengan lapisan masyarakat pengguna itu sendiri. Maka yang dibutuhkan adalah terus menerus mendorong vitalisasi manajemen partai politik tingkat paling bawah yang sensitif terhadap literasi politik masyarakat sekitar, dalam hal ini masyarakat pesisir. Di samping itu, mendorong juga adanya edukasi dan advokasi dari penyelenggara negara dan *civil society*, terutama masyarakat perguruan tinggi.

Dalam dan melalui edukasi, advokasi dan vitalisasi realisasi fungsi-fungsi partai politik, rasa kedekatan masyarakat dengan partai politik dapat meningkat secara signifikan. Masyarakat dapat memiliki kemampuan empati (*affective skill*) sekaligus kemauan untuk mendukung bahkan membela segala program-program partai politik dengan dasar pengetahuan yang luas (*cognitive skill*) tentang politik

(iklim, budaya dan sistem politik yang berlaku). Dan pada gilirannya masyarakat akan memiliki kemampuan mempraktikkan aksi-aksi atau perilaku-perilaku demokratis di segala ruang kehidupan, termasuk ruang berkeluarga, ruang beragama dan ruang bernegara .

#### DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A. and Powell, G. Jr. 1966. *Comparative Politics: A Development Approach*. Bombay: Private Ltd.
- Almond, Gabriel A. dan Verba, Sidney. 1984. *Budaya Politik; Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Terjemahan Shat Simamora, Jakarta: Bina Aksara.
- BPS Provinsi Jawa Barat, "Indeks Demokrasi Indonesia (IDI Jawa Barat Tahun 2015", Jurnal Berita Resmi Statistik, No. 46/08/32/Th.XVII, 05 Agustus 2016.
- Bhakti, Andi Faisal dkk., 2012. *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: Churia.
- Budiardjo, Miriam. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cipto, Bambang. 1996. *Partai Politik: Prospek dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahl, Robert A., 2001. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Denzin, Norman K. dan Lincoln, Yvonna S. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gatara, A.A. Sahid. 2009. *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan M. 1984. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Sangkala Puksar.
- Kemmis, Stephen dan McTaggart, Robin, "Penelitian Tindakan Partisipatoris", dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khoiron, M. Nur Khoiron, dkk. 1999. *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara*. Yogyakarta: Lkis.
- Laswell, Harold D. 1958. *Politics, Who Gets What, Whwn And How*. New York: World Publishing.
- Manulang, M. 1977. *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan: Monara.
- MTI. 2002. *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah*. Jakarta: MTI dan AusAID.
- Rosyada, Dede, et, al. 2003. *Civic Education; Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Jakarta.
- Rosyidin, Iding. 2017. *Pemilu Serentak dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi: Perlunya Upaya Literasi*

- Politik. Dalam Proceeding Seminar Nasional Apsipol. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Schmnadt, Hendry J. *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sururie, Ramdani Wahyu dkk,. 2016. *Paradigma dan Siklus KKN Sisdamas*. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ukas, Maman. 2004. *Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Agnini.
- Varma, SP. 1999. *Teori Politik Modern*. Terjemahan Yohanes Kristiarto SL. Jakarta: Rajawali Press.
- Novianti, E., Sjoraida, D., & Perbawasari, S. (2017). Patterns Of Communication Of Sunda-Minang Interethnic Families In Bandung, Indonesia. *JISPO : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 23 - 41. doi:<http://dx.doi.org/10.15575/jp.v6i1.1746>
- Haris, Iir. (2016). Negara Sekular-Islam Deskripsi Pandangan Dr. Muhammad Syahrur mengenai Hubungan Syura, Demokrasi dan Negara dalam Islam. *JISPO : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(1), 24-37. doi:<http://dx.doi.org/10.15575/jispo.v1i1.712>

### Website

[www.cikelet.garutkab.go.id](http://www.cikelet.garutkab.go.id)  
[http://media.unpad.ac.id/thesis/200110/2012/200110120247\\_4\\_4550.pdf](http://media.unpad.ac.id/thesis/200110/2012/200110120247_4_4550.pdf)  
[https://jabar.bps.go.id/new/webs/ite/brs\\_ind/brsInd-20160805113848.pdf](https://jabar.bps.go.id/new/webs/ite/brs_ind/brsInd-20160805113848.pdf)  
<http://www.kpud-garutkab.go.id>

### Jurnal

- Saepudin, E., & Damayani, N. (2016). Nilai-Nilai Budaya Sunda Dalam Permainan Anak Tradisional Di Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. *JISPO : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 1 - 22. doi:<http://dx.doi.org/10.15575/jp.v6i1.1745>